



KEPAHIANG

MINGGU, 13 FEBRUARI 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Usulkan Perbaikan Aset Provinsi

KEPAHIANG - Pemkab Kepahiang telah melakukan pendataan aset milik Pemprov Bengkulu yang mengalami kerusakan. Ada belasan titik aset khususnya jalan milik Pemprov yang dinilai layak diperbaiki dan direhabilitasi. Salah satunya adalah jembatan Konak, jembatan Kampung Bogor, jalan Mandi Angin, jalan Desa Suro, jalan Penanjung Panjang dan lainnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, Rudi Andi Sihalo, ST menerangkan, saat ini pihaknya telah melakukan pendataan di sejumlah titik dimana ada aset milik Pemprov yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Kepahiang. Data ini nantinya akan disampaikan ke Pemprov Bengkulu untuk diusulkan agar bisa segera dilakukan perbaikan.

"Seluruh aset provinsi berupa jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Kepahiang sudah kita laporkan pada pihak provinsi, dimana jalan dan jembatan yang rusak dengan harapan dapat direhabilitasi," jelas Rudi.

Hanya saja, dikatakan

Rudi, mengenai realisasi pembangunan jalan maupun jembatan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi sifatnya bertahap. Sementara kewenangan Dinas PUPR kabupaten hanya sebatas penanganan darurat.

"Kabupaten Kepahiang kewenangan sifatnya hanya penanganan darurat seperti kondisi di Desa Tebat Monok beberapa waktu lalu, namun untuk normalisasi adalah kewenangan provinsi. Dinas PUPR provinsi menyatakan untuk menindaklanjuti itu sifatnya bertahap," terang Rudi.

Di sisi lain, tambah Rudi, terkait usulan yang disampaikan pihaknya pada pemerintah provinsi direpson baik. Hanya saja untuk merealisasikan usulan tersebut Pemprov dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi juga terkendala keuangan.

"Harapan kita untuk merealisasikan jalan dan jembatan yang merupakan aset provinsi di Kabupaten Kepahiang ini menjadi skala prioritas provinsi, walaupun demikian Dinas PUPR mengalami keterbatasan anggaran," tutup Rudi. (sly)